

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Demokrasi selalu menemukan masalah dalam hal partisipasi mulai dari zaman Yunani hingga saat ini (Pickering et al., 2020. hlm 89). Orang yang seharusnya menjalankan *demos* dan fungsi dari *demos* itu terwadahi dari kepentingan warga negara yang sudah terwakili adalah sebuah masalah yang biasa dapat ditemui hingga sekarang. Sekalipun demokrasi dianggap sebagai model terbaik untuk mengambil keputusan dalam mengatasi suatu keadilan namun secara praksisnya masih tidak terlepas dari kritik. Teori demokrasi harus mencakup bentuk pengakuan, narasi, retorika, dan protes publik, bersama dengan argumen, dalam penjelasannya tentang cita-cita normatif komunikasi politik (Carayannis & Campbell, 2021, hlm. 67). Demokrasi inklusif melibatkan lebih dari kesetaraan formal semua individu dan kelompok untuk memasuki proses politik, tetapi memerlukan pengambilan langkah-langkah khusus untuk mengimbangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dari struktur sosial yang tidak adil.

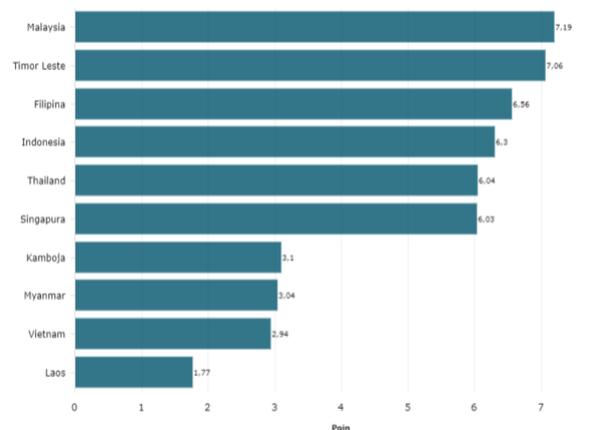
Salah satu kritik dari demokrasi yang disampaikan oleh Iris Marion Young adalah demokrasi harus dijalankan dengan sungguh-sungguh memperhatikan keadilan dan dapat mencapai kelompok sosial-politik termarginal, sehingga dapat dilaksanakannya demokrasi inklusi dalam mengatasi ketidakadilan, demokrasi komunikatif dan ketidaksetaraan sosial politik (Young, 2006, hlm. 65). Kurangnya implementasi dari demokrasi inklusif berakibat juga terhadap indeks demokrasi yang menurun (Szulecki, 2018).

Hal ini diperkuat dengan data Indeks demokrasi yang semakin menurun. Pada tingkat stabilitas nasional perlunya memperhatikan mengenai fenomena yang ada. Terlebih dalam kehidupan yang demokratis menghendaki adanya partisipasi inklusif dalam sebuah negara (Rahman, 2014, hlm. 45) . Untuk situasi ini, jelas mengingat laporan yang dibawa EUI *The Economist Intelligence* dengan ada pengurangan skor dari 6,48 menjadi 6,3 dari 2019 ke 2020 (Economist Intelligence Unit, 2020). Indonesia

menempatkan peringkat 64 dari 167 negara di dunia.

Gambar 1.1

### Skor Indeks Demokrasi di Asia Tenggara (2020)



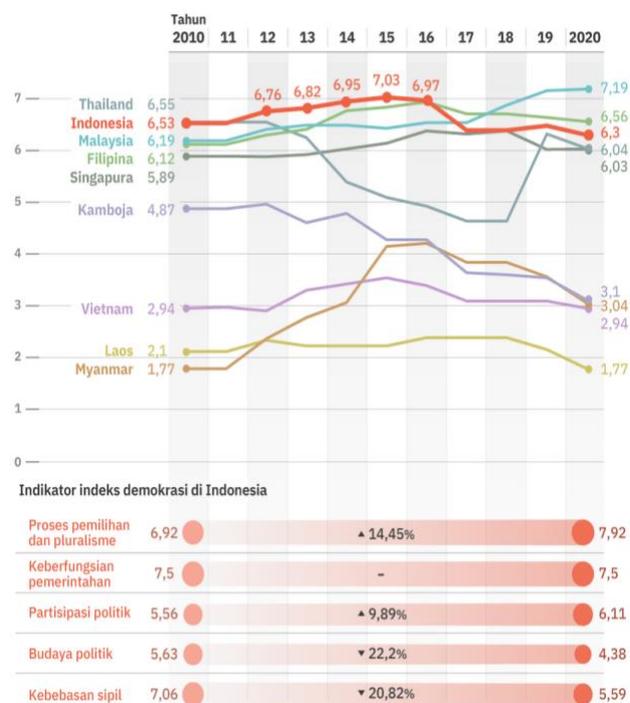
Sumber: *The Economist Intelligence Unit* (2021)

Pada suatu negara yang menjadi ukuran dari EIU ini diambil dari lima indikator, salah satunya pluralisme dan pemilu, kinerja dan fungsi dari pemerintah, kebebasan sipil, budaya politik, dan partisipasi politik. Proses pemilu dan pluralisme dengan perolehan skor 7.92. Skor 7.50 diberikan untuk indikator fungsi dan kinerja politik, partisipasi politik menempati skor 6.11 dan budaya politik diberikan skor 4.38, serta kebebasan sipil diberikan skor 5.59. Mulai dari tahun 2006 Indeks Demokrasi sudah mengatur mengenai indeks tersebut, di 167 negara di dunia dengan tujuan melihat langsung dan mengukur keadaan demokrasi. Rata-rata indeks demokrasi Indonesia yang menurun dari 5,44 menjadi 5,37 pada tahun 2019. Skor yang didapatkan Indonesia adalah skor yang paling rendah dalam empat belas terakhir semenjak adanya indeks demokrasi. Dari sisi berpendapat dan berekspresi di Indonesia sepanjang tahun 2020, banyak kesulitan dan pengekangan dari pihak kepolisian. Salah satu contoh yang dapat diambil ialah adanya penangkapan dan kekerasan yang ribuan orang yang sedang unjuk rasa mengenai omnibus *law* diberbagai daerah provinsi. Data yang tercatat ialah ada 4555 orang yang ditangkap secara sewenang-wenang dan 232 orang yang terluka pada aksi penolakan Undang-Undang cipta kerja di daerahnya masing-masing.

Demi berjalannya kehidupan politik yang demokratis dan adil itu menghendaki adanya partisipasi yang inklusif di dalam sebuah negara. Partisipasi menjadi ciri dalam negara demokratis, sehingga penggambaran dari adanya kelompok-kelompok sangat dibutuhkan. Dengan adanya keterwakilan tersebut sangat dibutuhkan karena hal tersebut yang dinamakan demokrasi inklusif (Daeli et al., 2017). Sementara itu, ketika membahas mengenai adanya kedaulatan rakyat maka ada yang disebut dengan pengelolaan yang dikatakan Abraham Lincoln, yang sebenarnya adalah dari (dari), oleh (oleh) , dan untuk (untuk) individu. Bahwa selain berbicara tentang kewajiban pemerintah, kontrol yang tidak ekspansif atau dibatasi, pembagian kekuasaan adalah hal yang sentral dan kepentingan politik yang komprehensif.

Gambar 1.2

## Demokrasi di ASEAN (2020)



Sumber: *The Economist Intelligence Unit* (2021)

Indikator IDI (Indeks demokrasi Indonesia) yang menurun ialah budaya politik dan kebebasan sipil. Kebebasan sipil dalam hal ini termasuk dalam ekstensi dan pembatasan-pembatasan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap lemah dan tidak berdaya. Kebebasan sipil yang ada di

Indonesia ini tidak menegakkan prinsip yang sudah legal diakui secara hukum. Padahal, kebebasan sipil yang ada di Indonesia sudah diatur dalam konstitusi Indonesia yakni Pasal 28A dan Pasal 28J. Di Lain hal, kebebasan sipil juga diatur dalam turunan peraturan perundang-undangan yakni pada Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Adanya meratifikasi ICCPR ini hal-hal yang terikat dalam menjamin kebebasan dan hak sipil warga sudah diikat. Meskipun dalam kenyataannya kita mendapati banyak sekali kasus pelanggaran atas kebebasan sipil di Indonesia.

Demokrasi inklusif yang diperkenalkan harus fokus pada kesetaraan dalam sosial-politik (Lee, 2021). Kesempurnaan dalam stabilitas seharusnya memberikan kemantapan terhadap tujuan dan hakikat dari stabilitas itu, terutama hal yang paling penting ialah usaha dalam menyiapkan pengembangan sosial-politik dalam perwujudan keadilan sosial dan demokrasi (Ugwu, 2020, hlm 45). Dalam perwujudannya peran pemuda mempunyai tantangan yang besar dalam memenuhi mekanisme *cheks and balance* sebagai syarat dari demokrasi pada sistem perpolitikan di Indonesia (Suta Wirawan & Mudana, 2021, hlm 34). Melalui gambaran itu, calon penulis menganggap hal ini penting untuk melakukan penelitian pada tataran perwujudan stabilitas nasional guna menghindari kejadian dari skenario terburuk, tanpa adanya keterlibatan demokrasi yang inklusif di Indonesia.

Penelitian yang disusun oleh Iris Marion Young banyak membahas mengenai demokrasi dan inklusi, namun belum menjelaskan secara rinci dari salah satu pihak atau kelompok yang mengalami penindasan. Iris Marion Young mengaitkan antara demokrasi dan keadilan sehingga menimbulkan yang disebut demokrasi inklusi. Namun peneliti saat ini membahas lebih mendetail demokrasi inklusi yang terjadi pada pemuda sebagai *agent of change*. Peranan pemuda dalam membangun bangsa, keefektivitasan pemuda yang masuk dalam struktur pemerintahan dan yang tidak terlibat langsung dalam struktur pemerintahan, sehingga hal ini

juga berkaitan erat dengan partisipasi pemuda yang inklusif saat ini (Ferguson & Valls, 2021, hlm 56).

Demokrasi yang inklusif pastinya tidak terlepas dari partisipasi politik yang inklusif (Adha et al., 2019, hlm 78) . Pemerintah tentunya tidak dapat menampung keseluruhan dari adanya jaminan kedaulatan rakyat. Maka dari itu, sebuah kekuatan dari luar pemerintahan diharap dapat tetap melaksanakan kedaulatan rakyat agar tetap eksis dan berfungsi (Pow, 2021, 78). Beberapa peran dari kekuatan luar pemerintah atau biasa disebut sebagai partisipasi ini menjadi penting keberadaanya, tentunya dalam hal memastikan bahwa pemerintahan yang ada saat ini masih dalam jalur kepentingan rakyat (Putra, 2019, hlm 45). Pada hal ini, kita dapat simpulkan bahwa keberadaan dari partisipasi sangatlah berkaitan erat dengan penegakkan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Suatu sistem pemerintahan demokratis tertentu tidak akan memberikan peluang atau pembatasan pada partisipasi inklusif dibandingkan sistem pemerintahan yang lain (Rüland, 2021, hlm. 56). Young menyatakan Pembatasan-pembatasan tersebut dianggap sebagai pilihan rasional yang perlu untuk melindungi mereka yang kelompok lemah dari berbagai hal yang kasar, keras, bahkan mungkin brutal. Sebagaimana diungkapkan oleh Iris Marion Young yakni berbagai bentuk pembatasan mendefinisikan pilihan yang tersedia untuk individu atau mendefinisikan kualitas untuk mengejar beberapa pilihan penting yang dibutuhkan sebagai aset dasar dan preferensi tertentu menciptakan batasan yang mendefinisikan apa yang kita sebut kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, kelas, ras, usia, dan sebagainya. Identitas yang ditemukan pada beberapa kelompok sosial berasal dari pembatasan semacam itu yang disisipkan ke dalam kesadaran atau indoktrinasi secara struktural (Anderson et al., 2022, hlm 34).

Identitas kelompok sosial sebagai produk pemikiran kelompok dominan selalu berada dalam situasi paradoks antara kebebasan untuk mewujudkan subjektivitas mereka dan mentransendensikan seluruh potensi yang dimiliki ke dunia aktual serentak tunduk pada keharusan

sosio-kultural yang mengikat dan membelenggu (Audretsch & Moog, 2022, hlm 56) . Young menilai bahwa tegangan antara imanensi dan *transendensi* semacam ini memasung potensi yang dimiliki untuk berkembang.

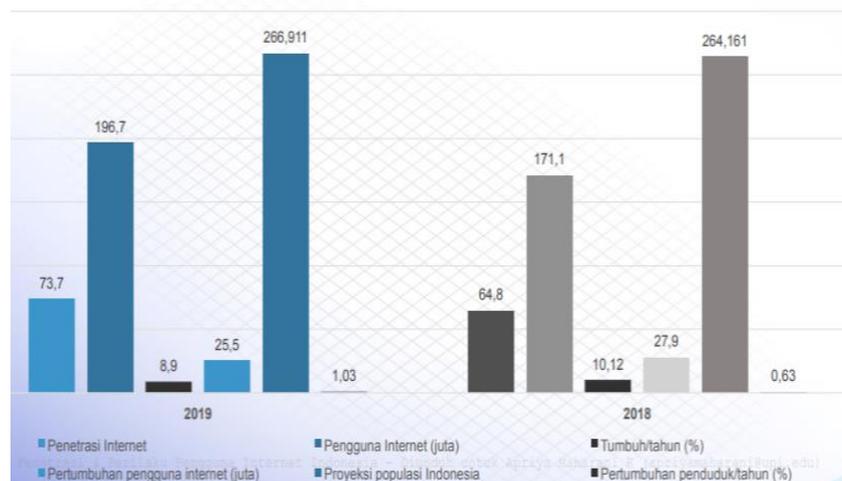
Salah satu demokrasi *athena* tidak runtuh adalah dengan adanya klaim beberapa orang yang kontradiksi dengan adanya dalam demokrasi karena adanya inklusif demokrasi yang bisa saja tidak dibiarkan matang (Munck, 2016, hlm 45). Dengan adanya demokrasi inklusif ini mencakup individu dan kolektif dalam mengambil sebuah keputusan, dengan adanya jaminan dalam hak-hak minoritas dan beberapa dari adanya konstelasi institusi dengan nilai yang ada pada warga. Pada demokrasi ini adanya upaya untuk kebijaksanaan dalam perenungan dan persyaratan etika, politik, komunitas dan diri sendiri yang nantinya dapat membuahkan sebuah hasil (Kumar, 2020, hlm 55). Upaya yang berusaha memadukan detail praktis dengan bermartabat, bahkan terangkat, visi pribadi manusia sangat penting. Seperti yang saya miliki disarankan, saya pikir itu kurang penting bahwa saya setuju dengan detail dari itu seperti upaya terjadi (Lamsal, 2020, hlm 44). Untuk semua alasan yang disebutkan di sini, saya harus menganggap Fotopoulos inklusif proyek demokrasi sebagai salah satu yang memberikan kontribusi yang tulus untuk perdebatan tentang kesejahteraan manusia dan lingkungan.

Refleksi tentang belenggu imanensi yang menghambat aktualisasi dan realisasi potensi dan kemampuan diri secara total sebagai dampak tekanan sosial-struktural yang mensituasikan dan mengkondisikan sekelompok masyarakat inilah yang mengarahkan pemikiran Young tentang pentingnya perjuangan politik bagi kaum lemah, tidak berdaya, marginal secara sosial, struktural, dan politik (Mukand & Rodrik, 2020, hlm 48). Ini dimaksudkan agar kelompok-kelompok yang selama ini tersisih dapat mencapai keadilan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kekhasan dan *partikularitas* yang menandai masing-masing. Dukungan politik komprehensif yang diperkenalkan harus fokus pada kesetaraan dan korespondensi dalam isu-isu sosial politik (Kurniadi, 2019, hlm 34).

Hal yang berlawanan dalam konteks Indonesia modern tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi yang semakin meningkat. Menurut hasil survei yang dilakukan, hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun (Nabila, 2019, hlm 57). Pesatnya perkembangan pengguna internet dalam kehidupan sehari-hari telah mencapai puncaknya. Sesuai ulasan yang diarahkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada April 2019 (APJII, 2019). Indonesia memiliki 171,7 juta klien Internet, atau sekitar 64,8 juta dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 264 juta orang (Katadata, 2020, hlm 77). Dibandingkan tahun sebelumnya, pengguna internet meningkat 10,2% atau 27,9 juta (Irawan et al., 2020, 89). Media baru ini juga menyebabkan munculnya demokrasi digital atau *cyber demokrasi*. Hal ini terutama relevan bagi para sarjana dan politisi yang memiliki lingkungan politik. Oleh karena itu, dalam hal ini media sosial digunakan sebagai sarana ruang publik untuk berdiskusi berbagai hal, termasuk politik.

Gambar 1.3

### Penetrasi dan Pengguna Internet di Indonesia



Sumber: Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020 (Q2)

Fenomena *cyber demokrasi* ini memiliki efek ganda yaitu positif dan negatif. Di satu sisi, penerapan beberapa prinsip seperti akuntabilitas, partisipasi publik, dan transparansi dapat mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (APJII, 2019). Halnya demokrasi siber, warga

negara akan memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pandangan mereka dan membuat keputusan tentang kebijakan publik. Hal ini berdampak positif karena meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Sisi negatifnya, demokrasi siber menyebabkan masalah dengan kampanye negatif yang biasa digunakan di media sosial dan *online*. Hal ini mengutamakan pesan-pesan negatif dari pasangan calon dan menciptakan kegairahan bagi pemilih selama masa kampanye. Menurut survei sebelumnya, pada level demokrasi virtual dan perang siber di media sosial, hanya Indonesia yang melihat netizen, bukan demokrasi siber dalam kampanye pemilihan umum. Dengan adanya fenomena tersebut, tujuan peneliti untuk mengetahui makna sosial yang berlawanan dan bagaimana pemuda/masyarakat membangun makna yang berlawanan dalam hal pendidikan kewarganegaraan (Gatara, 2016, hlm 66).

Mewujudkan demokrasi membutuhkan partisipasi yang benar-benar komprehensif, dan kondisi ini memberikan kesempatan yang sama bagi partisipasi semua pihak yang terlibat (Bitting, 2020, hlm 89). Salah satu partisipasi yang diharapkan adalah partisipasi pemuda Indonesia yang sedang memasuki era demografi saat ini dengan jumlah dan keragaman yang semakin meningkat (Hybel, 2020, hlm 67). Kaum muda harus dianggap sebagai aktor kunci, sehingga penting untuk melibatkan mereka dalam proses pembangunan. Sebagai pemimpin, kaum muda memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan yang mereka inginkan dan untuk mengekspresikan pandangan dan pendapat mereka tentang pembangunan negara (Sénit et al., 2016, hlm. 45).

Partisipasi dari tahun ke tahun tentunya tidak diragukan lagi mempengaruhi kerja sama atau partisipasi pemuda seperti sekarang, kemudian adil dan jujur tadi sebagai sebuah perkara menggunakan kurangnya partisipasi menurut pemuda (Pellicer et al., 2022, hlm. 79). Melalui empiris tadi, peneliti menduga krusial buat melaksanakan penelitian tentang konstruksi sosial makna menurut partisipasi waktu ini. Komprehensif dampaknya terhadap partisipasi politik pemuda sebagai upaya akademis untuk menemukan makna sosial dari perwakilan partisipasi,

dengan orientasi untuk menemukan makna pemberdayaan pemuda, pemahaman atau interpretasi partisipasi di mana subjek penelitian berpartisipasi (Saud et al., 2020, hlm. 66). Pemahaman total akan pentingnya kerjasama tentu akan membatasi dampak pesimistis dari tiadanya investasi atau partisipasi politik di kalangan anak muda, karena pemahaman dan kesadaran tentang partisipasi sudah berkembang dengan baik (Pedrazzani, 2017, hlm. 77; Rossi, 2009, hlm. 89).

Pemahaman total akan pentingnya dukungan pasti akan meminimalisir efek pesimistis dari tidak adanya kerja sama politik yang berkelanjutan di kalangan anak muda Schutz (dalam Hasbiansyah, 2008, hlm. 165) karena pemahaman dan kesadaran tentang partisipasi sudah berkembang dengan baik. Pada saat semua individu memiliki pencerahan yang besar ditengah kurangnya partisipasi politik saat ini dan dukungan politik yang komprehensif di negara yang berbasis suara, jelas itu akan membatasi efek pesimistis karena jernihnya kerja sama politik, hal ini dikarenakan mereka memiliki tujuan yang tulus dan berpikir jernih (Gukova et al., 2019, hlm 88). Khusus untuk anak muda saat ini, berbagai isu yang muncul dari misi negatif dan sistem aturan mayoritas digital adalah ikhtiar komprehensif persepsi partisipasi di arena politik untuk memperkuat pentingnya demokrasi dan kewarganegaraan pemuda tentang metodologi. Langkah-Langkah untuk Memperkuat Partisipasi dalam Kebijakan Pemuda (Fisher, 2012, hlm. 66).

Berdasarkan Data Statistik Pemuda Tahun 2020 (BPS, 2021), jumlah penduduk Indonesia yang besar diliputi oleh kaum muda, tepatnya 1 dari 4 penduduknya yang berusia 16-30 tahun sebanyak 64,50 juta orang. Dengan cara ini, peningkatan SDM yang kejam dan dominan harus memenuhi tanda dari Youth Development Index (IPP). Sehingga dengan adanya RPJMN tahun 2020-2024 ini sebesar 57,67 dan dengan adanya IPP pada tahun 2015-2019 menunjukkan 5 ruang yang 1 ruangnya belum mengalami perubahan yang signifikan, yaitu komponen inisiatif dan dukungan yang adalah jumlah IPP. baru sampai 46,67. Ini memberi kita perasaan bahwa pemuda saat ini tidak secara efektif mengambil bagian

dalam latihan organisasi atau kepemimpinan.

Mengingat konsekuensi dari survei pemeriksaan yang sebanding, memberikan klarifikasi bahwa kehadiran sistem berbasis suara saat ini didominasi oleh kaum muda (Aspinall, 2015, hlm. 60). Dengan banyak praktis mengenai kurangnya dan lemahnya keberadaan pemuda sebagai penyeimbang maka hal tersebut akan menjadi sebuah dampak yang sangat tidak seimbang dengan adanya pemerintahan saat ini. Tentang keamanan berbasis popularitas yang hilang dan melemahkan realitas mereka sebagai penstabil. Pengurangan berbicara atau melemahnya upaya anti korupsi akan memberikan bukti bentuk diskriminatif dari eksistensi demokrasi saat ini (Fealy, 2020, hlm. 56; Mietzner, 2012, hlm.77; Power, 2018, hlm 99). Salah satu proses langkah demi langkah pemuda untuk bertahan dalam ruang-ruang politik dengan menambahkan jenis aktivitas politik di mana aktivisme politik ini tidak membahayakan mereka dan memberikan citra tidak baik, inilah yang dinamakan dengan pemuda anarkis (Berents & McEvoy-Levy, 2015, hlm 89). Sebagian aktivitas anak muda selama pandemi dapat menyuarakannya melalui media sosial namun hal tersebut masih belum menyentuh keterlibatan dari kelompok rentan.

Dalam sisi dukungan dan kepemimpinan, ada 3 indikasi yang harus dipenuhi, yaitu tingkat pemuda yang mengikuti ramah tamah, tingkat pemuda yang dinamis dalam pergaulan dan tingkat pemuda yang mengeluarkan gagasan dalam rapat. Petunjuk dari informasi BPS tahun 2018 dan 2019 ini selalu stagnan dan benar-benar rendah, angka ini bertolak belakang dengan pelibatan kerja pemuda di masa pra-kemerdekaan. Kerja sama anak-anak muda dalam masalah legislatif masih diliputi oleh mereka yang memiliki fondasi kelas sosial dan moneter menengah ke atas serta mendapat kehormatan untuk mendapatkan berbagai jenis aset (Mohamad et al., 2018, hlm 72).

DPR saat ini, sebagai contoh dari politisi muda di lembaga publik cenderung kaya dan berpendidikan. Banyak juga yang terjun ke dunia politik karena sebelumnya keluarganya terlibat dalam partai politik. Bahkan, menurut Anne Phillips, seorang profesor ilmu politik di London

School of Economics (LSE) di Inggris, sistem politik perlu memiliki beberapa bentuk representasi yang mencerminkan komposisi kelompok masyarakat yang berbeda. "Politik kehadiran" dipandu untuk kepentingan semua kelompok (Oakley, 2020, hlm. 88). Sistem pemilu dan pembaruan partai politik perlu direformasi untuk memastikan bahwa kaum muda dipilih secara demokratis berdasarkan kemampuan mereka, tanpa mengandalkan keistimewaan atau ikatan keluarga (Willcocks et al., 2008, hlm. 70). Berbagai program berbasis "duta besar", seperti Duta Anti Narkoba", hanyalah gerakan yang mendukung visi suatu program saja, namun tidak menyisakan ruang untuk kritik terhadap isu-isu kunci seperti diskriminasi sipil dan kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba.

Sistem demokrasi yang inklusif ini secara komprehensif dapat bekerja dengan tiga hal, langsung dari kepercayaan pada sistem demokrasi, serta penguatan wanita di mana wanita juga dapat berdaya, pergi ke kelas dan sekolah (José zapata Campos et al., 2021, hlm 67). Kontribusi pemuda atau Generasi Z dalam masalah pemerintahan dapat menjadi salah satu nada pengakuan sistem mayoritas yang komprehensif. Kerjasama atau keterlibatan yang komprehensif ini tidak memikirkan adanya gender, kelompok budaya, etnis dan agama. Kerjasama yang komprehensif dapat dipahami jika ada tambahan gambaran dari golongan termarginalkan seperti wanita, penyandang disabilitas dan masyarakat adat (Waghmore & Gorringe, 2019, hlm. 78).

Kehadiran legislator muda yang berasal dari kelas sosial dan kondisi ekonomi tertentu menjadikannya suatu akses untuk mendapatkan aset, hal ini menimbulkan stigma di mata publik terhadap pemuda oligarki (Hadiz, 2019, hlm. 67). Menurut ulasan yang diarahkan pada pemuda yang memasuki kelas politik pertama, mereka belum memiliki kemampuan untuk membuat sebuah gerakan (Okthariza, 2020, hlm. 90). Terlepas dari munculnya stigma kaum muda oligarki, ada juga stigma para pemuda anarkis, khususnya kehadiran para remaja yang sering mengadakan pertunjukan atau demo jabatan publik saat mengadakan demonstrasi. Stigma tersebut dibuat-buat lalu mempengaruhi kepentingan politik pemuda saat

ini, terutama bagi anak muda yang dimarginalkan (Illescas-Martinez, 2017, hlm. 65). Ini bertentangan dengan dukungan politik yang inklusif, yang membutuhkan keterwakilan dari setiap kelompok pemuda saat ini.

Kerjasama politik dari tahun ke tahun tentunya berdampak pada perluasan dukungan pemuda (Wibowo et al., 2020, hlm 80). Salah satu akibat dari tingkat keterwakilan kelompok yang marginal yang belum optimal dilaksanakan adalah tidak adanya partisipasi politik, terutama bagi kaum muda. Sebuah stigma pemuda anarkis dan pemuda oligarki telah mengurangi kerja sama politik dan kepercayaan pada sistem demokrasi inklusif saat ini (Utami, 2019, hlm 78). Kehadiran variabel eksperimental, yang kurang pada partisipasi politik ini dapat dicegah dengan pengembangan kepentingan sosial dan membangun kembali konstruksi makna sosial dari adanya stigma dan peranan dari pemuda. Pemahaman yang menyeluruh terhadap pemberdayaan pemuda dapat mengubah pemahaman atau ketidaksepemahaman terhadap interpretasi subjek penelitian, untuk membatasi akibat buruk dari tidak adanya kerjasama atau partisipasi politik yang komprehensif dengan alasan bahwa kesadaran pemuda telah sangat terbangun (Intyaswati, 2021, hlm 67).

Pemahaman total tentang pentingnya pemberdayaan pemuda akan secara positif membatasi efek pesimistis dari tidak adanya kerja sama atau partisipasi politik yang berkelanjutan di antara anak muda Schutz (dalam Hasbiansyah, 2008b, hlm 55). Pemahaman lanjutan tentang pentingnya partisipasi pemuda, terlepas dari pemuda tersebut ke dalam struktur atau ruang pemerintahan memiliki pilihan untuk melakukannya secara efektif. Pada titik ketika orang-orang memiliki pemahaman yang baik dan benar dalam mewujudkan partisipasi politik yang inklusif di negara berbasis demokrasi ini, jelas itu akan mengurangi efek pesimistis, khususnya realitas dari adanya dukungan politik yang inklusif, karena mereka memiliki tujuan yang sungguh-sungguh dan pikiran yang jernih (Pickvance, 1998, hlm 89). Khususnya bagi kaum muda saat ini, berbagai isu yang muncul dari permasalahan adanya mengenai kampanye negatif dan demokrasi siber dalam upaya untuk memantik kaum muda yang mendasar dan partisipatif

dalam memperkuat pentingnya demokrasi inklusif dan kewarganegaraan pemuda yang berkualitas.

Mengingat survei eksplorasi yang sebanding atau hasil dari review penelitian terdahulu, memberikan klarifikasi bahwa kehadiran mayoritas inklusif aturan pemerintah untuk pemuda masih dari Aspinal di mata publik (Robet, 2019, hlm. 78). Dengan banyak pekerjaan yang berkaitan dengan keamanan pemerintahan salah satu contohnya dengan adanya melemahnya upaya anti korupsi, pengurangan berbicara atau berserikat hal tersebut memberikan bukti mengenai demokrasi yang mengalami diskriminatif dan melemahkan kehadiran pemuda sebagai penstabil (Fealy, 2020; Mietzner, 2021, hlm. 23). Salah satu cara muda untuk bertahan hidup pemuda dalam politik adalah dengan jenis kegiatan politik dimana kegiatan politik dalam bentuk aksi politik, hal tersebut membahayakan mereka dan membuat sebuah stigma mengenai pemuda yang anarkis (Berents & McEvoy-Levy, 2015, hlm. 29). Sebagian dari kegiatan anak muda selama pandemi dapat dilaksanakan melalui media sosial namun hal ini pun belum sepenuhnya masuk dalam keterlibatan kelompok rentan, padahal demokrasi yang berlangsung harus berdasarkan pada keadilan.

Demokrasi yang seimbang adalah demokrasi yang tidak oligarki dan tidak anarkis (Saud, 2020, hlm. 24). Jika dikaitkan dalam hal pemuda yang sering demo terdapat pemuda yang kritis namun anarkis, namun pemuda yang masuk ke dalam struktur pemerintahan membuat sebuah stigma pemuda yang oligarki (Saud & Margono, 2021, hlm. 45). Maka dari itu diperlukan skema pemuda yang menjadi harapan bangsa, nanti hasil penelitiannya dibuat sebuah indikator dan menjadi basis pemberdayaan pemuda. Dengan kekhasan bahwa ada anak muda yang mengalami sebuah fenomena untuk menjadi bagian dari staf pemerintah, sekalipun bermunculan stigma pemuda yang oligarki (Mohamad et al., 2018, hlm. 34).

Isu-isu yang berbeda telah digambarkan, secara umum memusatkan perhatian pada pengembangan konstruksi makna pemberdayaan pemuda, agar dapat meningkatkan partisipasi politik inklusif dalam menjalankan stabilitas nasional, realitas serta praksis peran pemerintah dalam penguatan

partisipasi politik inklusif, peran pemuda pada partisipasi, serta konstruksi sosial yang terbangun pada saat ini. Oleh karena itu, penelitian tentang konstruksi makna yang berlawanan memiliki peran strategis dalam menemukan gambaran utuh yang menjadi landasan pemikiran dan kesadaran untuk merespon dan melaksanakan peningkatan kualitas partisipasi politik pemuda yang inklusif. Selain upaya akademis untuk menjelaskan esensi makna yang berlawanan, penelitian ini juga perlu mengkaji realitas partisipasi pemuda dalam pemerintahan dan organisasi kepemudaan dan pemerintah. Tentu saja, orientasi ini dipertimbangkan dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan, yang mendorong upaya untuk memperkuat substansi dan gagasan instruksi pendidikan kewarganegaraan.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Demokrasi inklusif sangat menentukan perannya dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang ideal, kompleksnya kehidupan bernegara pada era modern saat ini, baik bagi pemuda, pemerintah dan masyarakat. Karena berbagai permasalahan tersebut di atas, maka arah penelitian ini wajar. Pertama, kita akan mempelajari dan menganalisis secara mendalam makna sosial yang berlawanan dari perspektif pendidikan kewarganegaraan, dan membuat konstruksi makna ini objektif dan komprehensif. Kegiatan lanjutannya adalah pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang memberikan pendidikan kewarganegaraan dan yang meningkatkan keterampilan kewarganegaraan bagi pemuda. Kedua, menggali dan menganalisis secara mendalam, realitas partisipasi politik inklusif dalam menjalankan dan mewujudkan stabilitas nasional, *ketiga*, menggali dan menganalisis peran paradigma pemberdayaan pemuda pada partisipasi politik inklusif dalam pembangunan makna konstruksi sosial. Realitas dan masalah ini diselidiki dan diperiksa melalui penelitian fenomenologis menurut sudut pandang pendidikan kewarganegaraan, karena mereka adalah studi yang meluas tidak hanya ke ruang kelas (pendidikan kewarganegaraan) tetapi juga masyarakat (pendidikan kewarganegaraan). Untuk membantu peneliti melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini, maka uraian

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan demokrasi inklusif pemuda dalam mewujudkan stabilitas nasional?
2. Bagaimana faktor determinan yang mendasari Pemuda dalam berpartisipasi pada Pemerintahan?
3. Bagaimana konstruksi makna yang dibangun dari pemberdayaan pemuda?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Dalam hal memperbaiki dan mengevaluasi konsep akan menjadi orientasi pada riset ini untuk memberikan kontribusi ilmiah pada pemerintah, serta praksis dari partisipasi politik pemuda, memperkaya dan mengembangkan kajian ilmiah mengenai realitas paradigma pemuda terhadap demokrasi inklusif, dengan menggali dan menganalisis adanya penelitian dengan secara komprehensif tentang adanya konstruksi makna sosial pemberdayaan pemuda dan penguatan demokrasi inklusif dalam rangka mengatasi berbagai problematik kebangsaan yang semakin dinamis dan kompleks, melalui perspektif keilmuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang lebih menyeluruh.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Pada konteks orientasi yang khusus, penelitian ini lebih mengarahkan pada pengetahuan jawaban objektif dan ilmiah dari rumusan masalah yang ada, dengan kualifikasi yang lebih menyeluruh dan lebih jelas pastinya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kemampuan Demokrasi Inklusif Pemuda dalam Menjalankan atau Mewujudkan Stabilitas Nasional.
  - a) Kebijakan pemerintah yang melindungi eksistensi demokrasi pemuda yang inklusif
  - b) Kebijakan pemerintah yang memberikan pelayanan optimal terhadap demokrasi inklusif pemuda kontemporer.
2. Untuk mengetahui tentang faktor determinan yang mendasari Pemuda dalam berpartisipasi Pada Pemerintahan?

- a) Relevansinya dengan pendidikan politik.
  - b) Persepsi pemuda dengan faktor determinan memilih berpartisipasi aktif dalam pemerintahan.
3. Untuk mengetahui makna yang dibangun dari pemberdayaan pemuda.
- a) Konstruksi sosial makna pemberdayaan pemuda.
  - b) Pengembangan pendidikan politik melalui pendidikan kewarganegaraan berbasis penguatan demokrasi inklusif pemuda.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat dari Segi Teoritis**

Dengan merekonstruksi sebuah makna sosial pemberdayaan pemuda secara komprehensif adalah sebuah manfaat dari penelitian ini. Dalam mendefinisikan makna sosial pemberdayaan pemuda, harus melalui konstruksi sebuah upaya ilmiah. Sehingga sifatnya lebih tidak subjektif dan lebih menyeluruh, pandangan ini juga merupakan upaya logis dalam membangun hipotesis, ide, dan penemuan asli sehubungan dengan pentingnya dukungan sosial, meskipun spekulasi terkait telah ditemukan, tentu saja konsekuensi dari penelitian ini tentang pentingnya kerja sama sosial dapat digunakan sebagai sumber. perspektif untuk eksplorasi penting tambahan. Jika manfaat hipotetis dari eksplorasi, masuk akal secara pasti, adalah sebagai berikut:

- a) Ter Konstruksinya makna sosial pemberdayaan pemuda secara komprehensif.
- b) Tersusunnya kajian ilmiah mengenai penguatan demokrasi pemuda inklusif melalui konstruksi makna sosial pemberdayaan pemuda secara komprehensif.
- c) Ter Konstruksinya penguatan dari partisipasi politik pemuda inklusif dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.
- d) Dikembangkannya kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan tentang pendidikan politik pemuda berbasis penguatan kompetensi kewarganegaraan dan pelayanan optimal kepada pemuda.

### **1.4.2 Manfaat dari Segi Kebijakan**

Seiring dengan adanya fenomena tersebut, tentunya akan sangat

dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam sesuai dengan cita-cita dan realitasnya. Terutama dalam hal ini mengingat menemui makna objektif dari pemberdayaan pemuda dan penguatan demokrasi yang inklusif. Tentunya manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan evaluasi dan analisis dari kebijakan partisipasi pemuda melalui langkah ilmiah, yang mana nantinya akan mengarah apa terkonstruksi makna sosial pemberdayaan pemuda secara objektif dan utuh, ketika mengetahui realitas dan problematika dengan memenuhi demokrasi inklusif serta upaya yang akan dilakukan dalam menanggulangi hal tersebut dan rekomendasi melalui efek samping dari ulasan ini. Lebih banyak wawasan tentang keuntungan eksplorasi menurut sudut pandang strategi, mengarah pada:

- a) Memberi informasi saintifik kepada Pemerintah dan masyarakat Indonesia mengenai makna komprehensif pemberdayaan pemuda.
- b) Memberikan penggambaran kepada orang-orang secara umum tentang kebenaran dan isu-isu kepuasan pemuda yang potensial membuka pintu sebagai penghuni, yang merupakan bagian penting dari masyarakat.
- c) Mewujudkan *citizenship education* sebagai jenis kegiatan sosial ke daerah setempat melalui jenis pembelajaran pemuda.

### **1.5 Struktur Organisasi Tesis**

Peneliti dalam membuat sebuah struktur dari penelitian tesis ini berdasarkan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (2019), sehingga yang dihasilkan terdiri dari 5 Bab, yang berfokus pada:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini peneliti memberikan sebuah penjelasan mengenai fakta atau temuan dan hasil penelitian pendukung lalu dijelaskan berdasarkan landasan pemikiran serta pertimbangan rasional peneliti. Bab ini juga memberikan sebuah upaya kuat agar membangun argumentasi yang rasional sehingga berlandaskan pada sifat yang asli dan menarik untuk dikonsentrasikan secara lebih mendalam, baik secara skolastik maupun sosial. Bagian ini terdiri dari beberapa sub-bagian, khususnya landasan eksplorasi, definisi masalah, tujuan umum serta khusus, manfaat

penelitian dan terakhir yaitu struktur organisasi tesis.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini memberikan sebuah gambaran mulai dari teori, konsep, generalisasi dan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya atau biasa disebut dengan *novelty*. Peneliti menggunakan penelitian sebelumnya sebagai rujukan dalam menganalisis, mengkonfirmasi dan merefleksikan temuan dari hasil penelitian ini yang relevan. Berdasarkan pada penelitian yang diambil, tentu beberapa kajian yang terkait dengan teori konstruksi makna sosial, aliran filsafat politik dan pendidikan, jaminan hak pemuda sebagai warga negara dalam bidang pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan, teori dan konsep mengenai perkembangan alur pendidikan kewarganegaraan, serta dalam hal ini hasil riset yang relevan sebelumnya sebagai rujukan primer peneliti.

Bab III Metode Penelitian, penjelasan pada bab ini lebih berfokus kepada pendekatan serta metode penelitian yang peneliti pakai serta alasan dari peneliti memilih pendekatan dan metode itu. Lalu pada bab ini juga, ada beberapa hal mengenai deskripsi dari desain penelitian, lokasi dan subjek penelitian, prosedur penelitian, penjelasan istilah yang terkait dengan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis dan validitas data yang diperoleh.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, pada bagian ini, penemuan dan percakapan pemeriksaan digambarkan secara terorganisir, metodis dan dari atas ke bawah, sehingga lengkap. Tentunya, dengan tujuan untuk memberikan klarifikasi yang lengkap, bagian ini juga memberikan klarifikasi tentang bidang dan kepribadian subjek pemeriksaan dan penemuan-penemuan eksplorasi. Berkenaan dengan pembahasan ujian dalam ulasan ini, sebagian besar mendorong 1) kebenaran penguatan pemuda yang memuaskan yang memuat faktor dan masalah nyata demokrasi inklusif oleh pemerintah sebelum dan sesudah banyaknya pemuda yang masuk dalam struktur pemerintahan 2) faktor determinan pemuda masuk dalam pemerintahan., untuk mengetahui strategi pemerintah yang melindungi hak-hak istimewa pemuda, pemanfaatan hiburan virtual untuk tujuan menarik pemuda 3) pengembangan pentingnya penguatan pemuda, yang mendorong

pengembangan pentingnya penguatan pemuda dalam sudut pandang pelatihan kota dan peningkatan rencana pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan dalam rangka memperkuat kemampuan kota dan bantuan ideal untuk kaum muda. Segmen percakapan adalah cara untuk memeriksa faktor, masalah, dan lubang nyata dalam penemuan penelitian dengan berbagai ide, hipotesis, pendekatan, dan konsekuensi dari pemeriksaan masa lalu yang pada umumnya dapat diakses di bagian survei tertulis.

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Bagian ini berisi pengaturan dan proposal untuk masalah penelitian. Keputusan tersebut merupakan solusi tegas atas masalah yang dirangkum melalui definisi masalah eksplorasi. Konsekuensinya adalah efek pemeriksaan pada pemuda yang dikenang untuk struktur otoritas publik, karena itu mengembangkan signifikansi penguatan pemuda secara mendalam, dengan cara ini membatasi praksis strategi yang berkembang dari signifikansi itu, saran untuk pengaturan dalam memenuhi hak-hak istimewa pemuda. Sebagai warga, jaminan yang begitu sah, administrasi yang ideal dan bantuan edukatif, tidak bersifat prosedural, juga memiliki saran untuk strategi penguatan pemuda, dalam praksis pembelajaran langsungnya, selain memusatkan perhatian pada penguatan kemampuan kewarganegaraan siswa, ia juga harus membidik upaya untuk terlibat dan menentukan masalah sosial secara lokal, yang tidak kalah pentingnya adalah konsekuensi dari pelatihan kewarganegaraan sebagai suatu disiplin. Ilmu yang digeluti oleh ahlinya, akibat-akibatnya, secara garis besar mempengaruhi upaya bersama strategi penguatan pemuda dan Pendidikan Kewarganegaraan, guna menemukan hipotesis, penemuan dan cara menghadapi Pendidikan Kewarganegaraan dalam penguatan pemuda, yang mendorong perbaikan program pendidikan logis dalam terang memperkuat kemampuan kewarganegaraan pemuda. Proposal adalah karya untuk memberikan analisis, ide dan gagasan logis, karena merupakan konsekuensi dari eksplorasi ini, untuk menjadi jawaban dalam meningkatkan atau memperkuat strategi pemerintah dan pendidikan lanjutan dalam kaitannya dengan penguatan pemuda, serta memperkuat pekerjaan lokal. area dalam strategi ini, sehingga mereka ideal dalam menangani penghargaan

segmen. Menjelang akhir bagian penutup, perdebatan penting juga diperkenalkan, karena mereka ditemukan berdasarkan hasil eksplorasi.